



ISU-ISU PENGAWASAN APU PPT

Departemen Surveilans Sistem Keuangan

September 2020

GAMBARAN RISIKO PU/PT DI MASA PANDEMI

PSBB / Lockdown
Peningkatan Penjualan Online
Peningkatan Permintaan alat medis
Fls memberi layanan terbatas
Pengangguran dan Ekonomi Lesu
Reprioritisasi program dan sumber daya pemerintah untuk penanganan Covid19

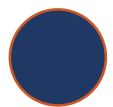
Kondisi Sosial Ekonomi



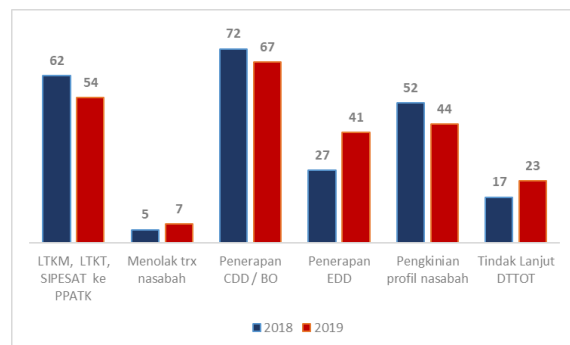
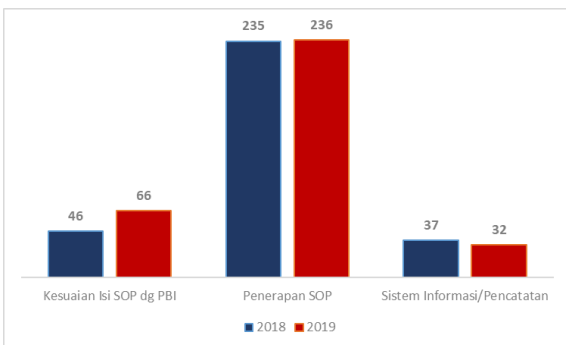
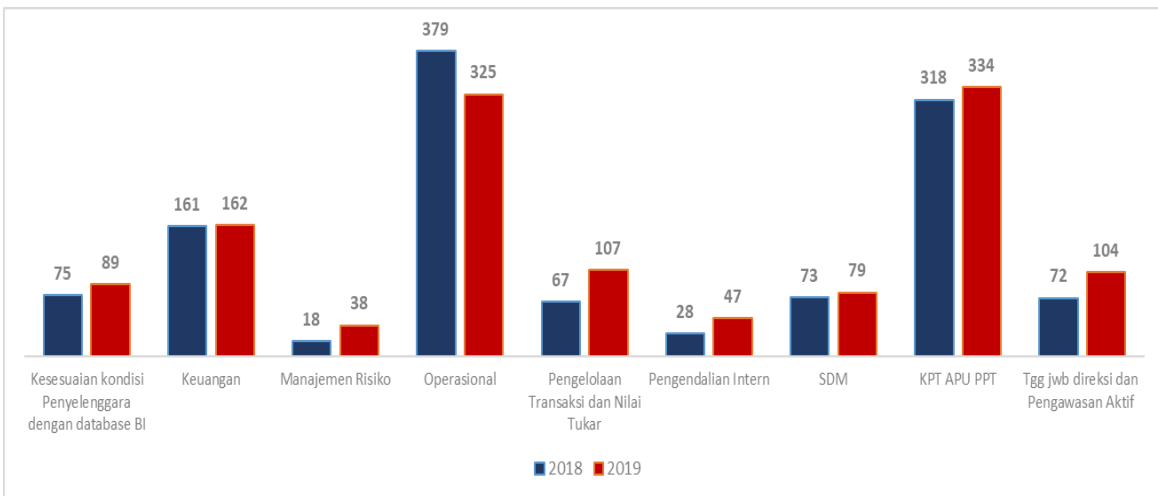
Ancaman	
TPPU	TPPT
<p><i>Fraud</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Peniruan identitas sebagai pegawai/pejabat pemerintah •Pembajakan alat/barang medis. •Penggalangan dana lembaga amal palsu •Penipuan investasi 	<p><i>Terrorist groups using the COVID-19 crisis to raise and move funds and increase existing illicit activity to finance their operations.</i></p>
<p><i>Cyber Crime</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Serangan Email dan SMS phishing •Business email compromise scams •Ransomware attacks 	
<p><i>Dampak terhadap kejahatan lainnya</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Penyelundupan dan eksploitasi manusia •Eksploitasi anak secara daring •Kejahatan terkait properti 	

- Pelaku kejahatan melakukan *by pass CDD measures*
- Penyalahgunaan layanan keuangan daring dan aset *virtual*
- Memanfaatkan stimulus ekonomi dan skema *insolvensi*
- Penggunaan Fls yang tidak diawasi meningkat.
- Penyalahgunaan bantuan keuangan nasional/internasional
- Mengeksploitasi kesempatan bisnis di negara berkembang

Sumber:
 COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses, Mei 2020.

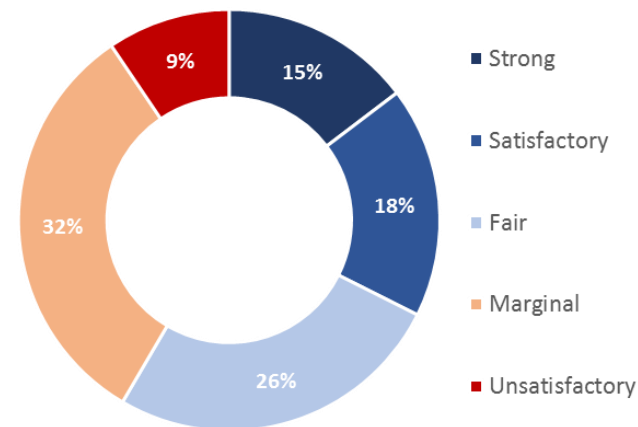


Aspek APU PPT membutuhkan perhatian dan perbaikan dari Penyelenggara KUPVA BB.



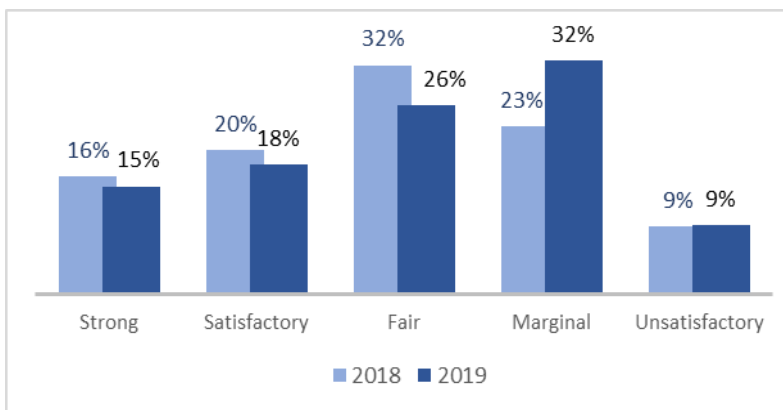
Pada tahun 2019 temuan tertinggi ada pada aspek Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) APU PPT. Lebih rincinya ada pada aspek Penerapan SOP dimana Penerapan CDD/BO yang paling mendominasi diikuti oleh pelaporan LTKM/LTKT & SIPESAT, dan pengkinian profil nasabah.

Predikat Kualitas Penerapan Program APU PPT



Pada tahun 2019 sebanyak 941 (81%) KUPVA BB yang telah memiliki hasil penilaian net risk.

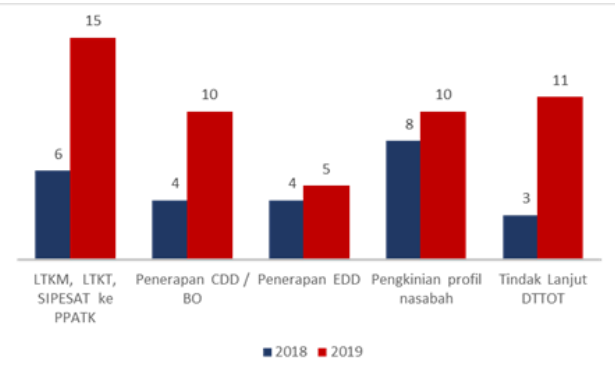
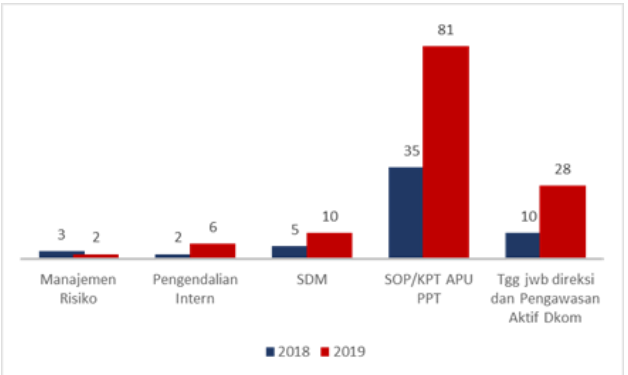
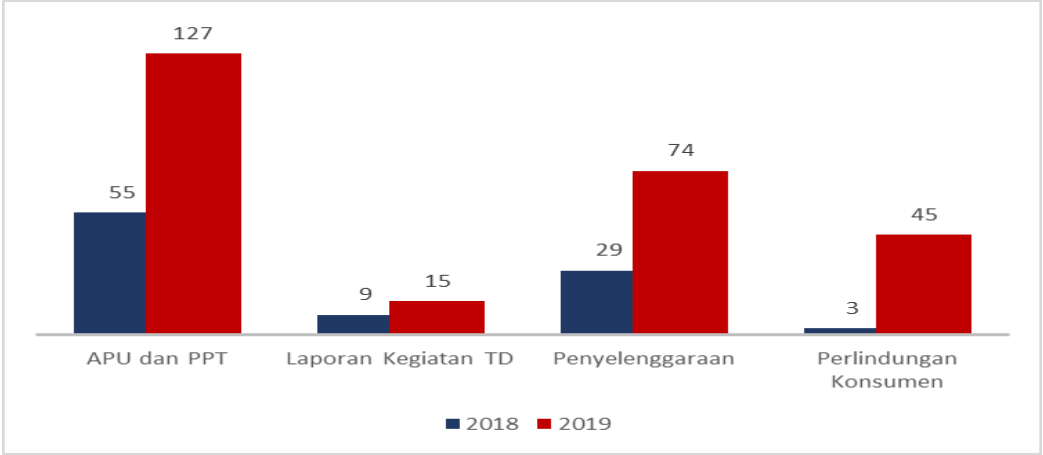
Masih terdapat 9% Penyelenggara dengan predikat "Unsatisfactory" pada tahun 2018 dan 2019.



Predikat "Fair" dan "Marginal" mendominasi Kualitas Penerapan Program APU dan PPT

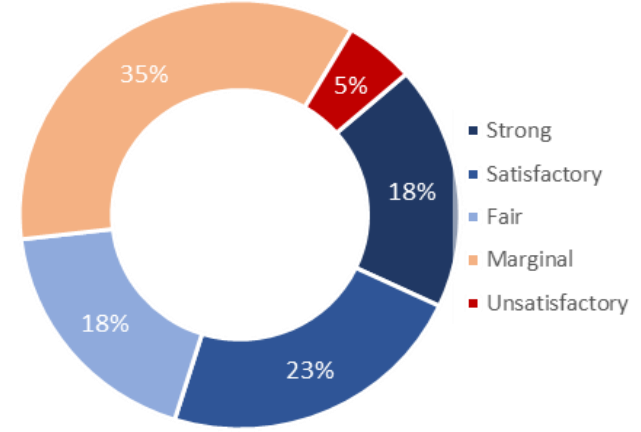


Aspek APU PPT membutuhkan perhatian dan perbaikan dari Penyelenggara PTD BB.

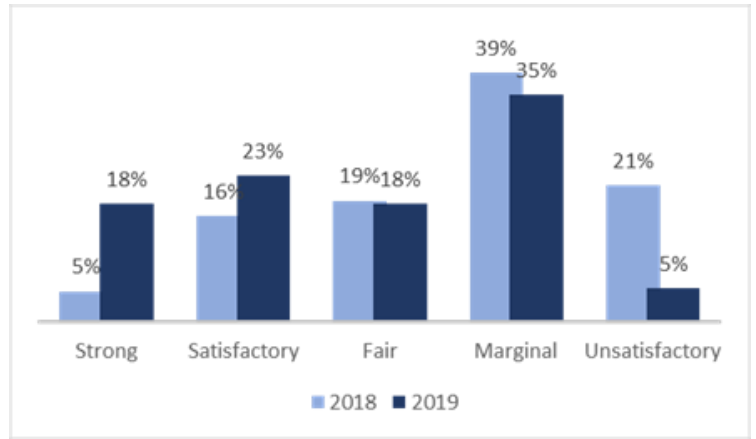


Pada tahun 2019 temuan tertinggi ada pada SOP/KPT APU PPT, lebih rinci lagi adalah terkait LTKM, LTKT dan SIPESAT kepada PPAK diikuti tindak lanjut DTTOT, pelaporan LTKM/LTKT & SIPESAT, dan pengkinian profil nasabah.

Predikat Kualitas Penerapan Program APU PPT



Pada tahun 2019 sebanyak 130 (85%) PTD BB yang telah memiliki penilaian Net Risk



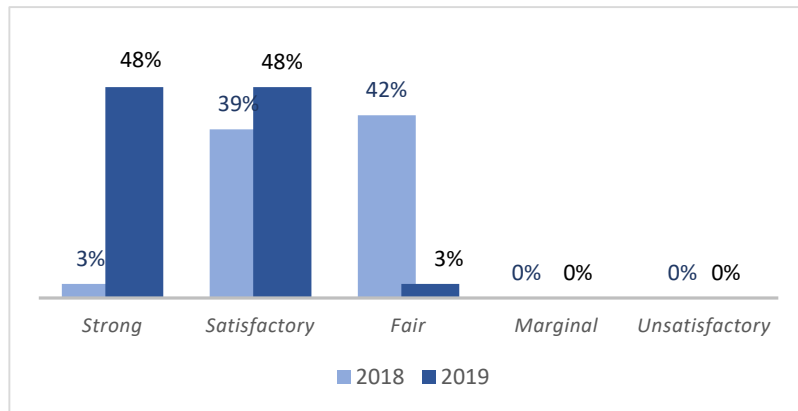
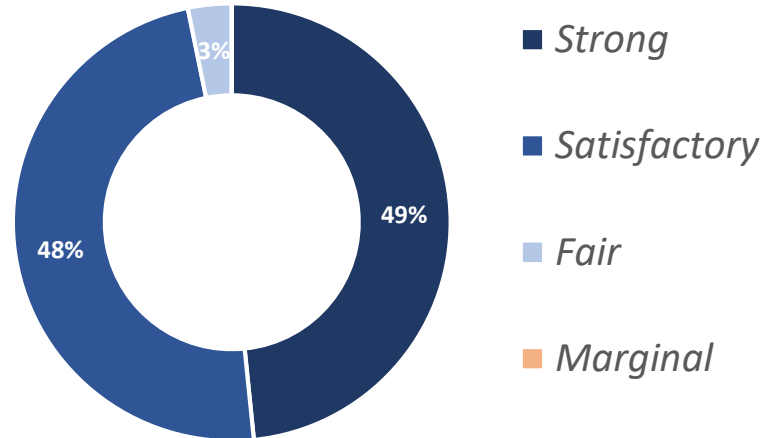
Masih terdapat 5% Penyelenggara dengan predikat "Unsatisfactory" pada tahun 2019.

Predikat "Satisfactory" dan "Marginal" mendominasi Kualitas Penerapan Program APU dan PPT

APMK, UE dan DE

Aspek APU PPT sudah cukup baik namun tetap perlu pembenahan secara berkesinambungan.

Predikat Kualitas Penerapan Program APU PPT



Predikat "Strong" dan "Satisfactory" mendominasi Kualitas Penerapan Program APU dan PPT

1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

- Penerapan APU dan PPT tidak dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan

2. Kebijakan dan Prosedur Tertulis

- Masih ditemukan ketidaklengkapan kebijakan dan prosedur tertulis yang dimiliki Penyelenggara, seperti belum ada prosedur CDD, pelaporan transaksi dan pengelolaan data.

3. Proses Manajemen Risiko

- Penyelenggara belum menerapkan identifikasi risiko sesuai dengan ketentuan

4. Manajemen Sumber Daya Manusia

- Penerbit/Penyelenggara belum melakukan penyaringan sebagai bagian dari proses **penerimaan pegawai untuk memastikan calon pegawai tidak pernah terlibat dalam TPPU dan/atau TPPT**
- Penerbit/Penyelenggara belum **melakukan pemantauan terhadap profil pegawai dan secara berkesinambungan memberikan pelatihan**

5. Sistem Pengendalian Internal

Penerbit/Penyelenggara belum menerapkan sistem pengendalian internal yang paling kurang meliputi:

- Penetapan fungsi dan atau penunjukan anggota Direksi/Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab khusus untuk penerapan APU dan PPT
- Pelaksanaan audit berkala terhadap kepatuhan dan efektivitas penerapan APU dan PPT oleh pihak yang independen (internal maupun eksternal Penyelenggara)



Terima Kasih

Supervisors, financial intelligence units and law enforcement agencies should continue to share information with the private sector to prioritise and address key ML risks, particularly those related to fraud, and TF risks linked to COVID-19. Additionally, criminals and terrorists may seek to exploit gaps and weaknesses in national anti-money laundering/counter-financing of terrorism (AML/CFT) systems while they assume resources are focused elsewhere, making risk-based supervision and enforcement activity more critical than ever. Financial institutions and other businesses should remain vigilant to emerging ML and TF risks and ensure that they continue to effectively mitigate these risks and are able to detect and report suspicious activity.

(Statement by the FATF President: COVID-19 and measures to combat illicit financing, April 2020)